

Workshop Hukum dan Pengelolaan Kesekretariatan Dalam Asistensi Penanganan Pelanggaran Untuk Staf dan Pendukung Pada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Dony Yusra Pebrianto¹, Akbar Kurnia Putra², Budi Ardianto³, Bernard Sipahutar⁴,
Ramlan⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi

² Fakultas Hukum Universitas Jambi

³Fakultas Hukum Universitas Jambi

⁴Fakultas Hukum Universitas Jambi

⁵Fakultas Hukum Universitas Jambi

E-mail: dony_yusra@unja.ac.id

Article History:

Received: 17 Oktober 2024

Revised: 01 November 2024

Accepted: 05 November 2024

Keywords:

Bawaslu; Pilkada; Staf

Sekretariat; Hukum;

Penanganan Pelanggaran

Abstract: Keberadaan sekretariat dalam mendukung kinerja pengawasan Pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam hal penanganan pelanggaran. Keberadaan staf sekretariat merupakan salah satu pilar dalam hal penanganan pelanggaran, diawali dari fungsi konsultasi, penerimaan laporan, proses penanganan pelanggaran mulai dari proses pembuktian hingga kajian sangat bergantung kepada sejauh mana staf sekretariat memahami aspek hukum dan pengkajiannya baik secara materil maupun formil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri apalagi mengingat keberadaan staf sekretariat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi hanya 1 (satu) yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk mendukung pimpinan yang hanya 1 yang berlatar pendidikan hukum serta 1 kepala sekretariat yang juga berlatar pendidikan hukum. Oleh karena itu perlu workshop hukum serta pengelolaan kesekretariatan untuk membangun pemahaman dan skill bagi staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka penguatan kemampuan asistensi staf sekretariat mengenai hukum dalam proses penanganan pelanggaran khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak Tahun 2024

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 akan segera berlangsung. Merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan tersebut akan diawali pada April 2024. Setiap elemen kunci penyelenggaraan Pilkada perlu untuk mendapatkan penguatan dalam rangka mewujudkan Pilkada yang demokratis.

Penyelenggara pemilu yang berkualitas memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas (Feka et al., 2020) . Penyelenggara Pemilu adalah garda terdepan dalam memastikan proses pemilihan umum berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Penyelenggara yang berkualitas akan memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, memastikan bahwa setiap tahap pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan cermat dan tanpa keberpihakan (Winardi, 2021) . Kualitas penyelenggara pemilu juga mencakup kemampuan mereka untuk mengelola konflik, menghadapi tantangan teknis, dan menjaga netralitas dalam menghadapi tekanan politik. Dengan demikian, penyelenggara pemilu yang berkualitas dapat memberikan kepercayaan kepada publik bahwa hasil pilkada mencerminkan kehendak rakyat secara autentik, dan memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memastikan keberlangsungan demokrasi melalui pengawasan dan penegakan hukum dalam setiap tahapan pemilu. Dalam proses pengawasan, Bawaslu bertugas untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kebersihan pemilu dengan mengawasi proses kampanye, pemutakhiran data pemilih, serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan hukum terkait pelanggaran pemilu, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), money politics, atau pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas pemilu (Pamungkas & Sy, 2023) . Dengan perannya yang vital ini, Bawaslu menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta menjamin keberlangsungan sistem politik yang berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu lembaga pengawas pemilu yang berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum pemilu di wilayahnya. Dengan kelembagaan berjenjang yang terstruktur, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi mampu melakukan pengawasan secara efektif mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui berbagai mekanisme pengawasan yang dilakukan, seperti pemeriksaan pelanggaran kode etik dan hukum pemilu, serta penanganan sengketa pemilu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Dengan demikian, lembaga ini memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi.

Staf sekretariat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muaro Jambi, khususnya dalam pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan pengelolaan kesekretariatan. Staf sekretariat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan administratif yang mendukung operasional Bawaslu, seperti pengelolaan data, penyusunan laporan, serta koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal. Dalam konteks pengawasan pemilu, staf sekretariat berperan penting dalam memfasilitasi proses pengumpulan informasi terkait pelanggaran pemilu dan memastikan bahwa pelaporan dan penanganan kasus dilakukan secara efisien. Selain itu, mereka juga turut mendukung penegakan hukum pemilu dengan menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan dalam proses penyidikan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Pengelolaan kesekretariatan yang baik juga menjadi kunci dalam memastikan kelancaran dan efisiensi kerja Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk

mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Pemahaman yang kuat tentang hukum merupakan hal yang sangat penting bagi staf sekretariat Bawaslu. Hal ini karena dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan pelanggaran pemilu dan kesekretariatan, mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang aspek hukum secara materiil maupun formil. Pemahaman materiil hukum memungkinkan mereka untuk memahami substansi dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pemilu serta implikasinya terhadap tindakan-tindakan yang diambil. Sementara itu, pemahaman formil hukum memungkinkan mereka untuk memahami prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu. Dengan pemahaman yang kokoh tentang hukum, staf sekretariat Bawaslu dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokrasi dalam pemilu.

Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Muaro Jambi dalam bidang hukum terutama terletak pada keterbatasan jumlah SDM yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Dengan hanya satu pimpinan, satu kepala sekretariat, dan satu staf sekretariat yang berpendidikan hukum, lembaga ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi penanganan pelanggaran dan pengelolaan sekretariat. Keterbatasan ini memperumit tugas-tugas mereka, terutama ketika menghadapi kompleksitas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan peningkatan pemahaman hukum bagi seluruh SDM Bawaslu Muaro Jambi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang berfokus pada pemahaman hukum terkait penanganan pelanggaran dan pengelolaan sekretariat dalam menyongsong penyelenggaraan Pilkada serentak dan aspek-aspek hukum lainnya yang relevan dengan tugas mereka. Selain itu, upaya untuk mendiversifikasi latar belakang pendidikan SDM, terutama dalam bidang hukum, juga perlu dilakukan agar Bawaslu Muaro Jambi memiliki tim yang lebih beragam dan kompeten dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam konteks pelaksanaan Pilkada dan tugas-tugas lainnya. Dengan upaya ini, diharapkan Bawaslu Muaro Jambi dapat lebih siap dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam Pilkada serentak 2024 dan tugas-tugasnya yang lainnya.

Kegiatan workshop ini merupakan inisiatif berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2023. Pada tahun sebelumnya, fokus kegiatan adalah peningkatan pemahaman hukum bagi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dampak positif dari kegiatan tersebut terbukti dari kondisi proses pemilu di Muaro Jambi yang lebih lancar dan efektifnya penanganan pelanggaran, sehingga tidak menimbulkan sengketa lebih lanjut.

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Workshop Hukum dan Pengelolaan Kesekretariatan Dalam Asistensi Penanganan Pelanggaran untuk Staf dan Pendukung pada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menjadi suatu langkah yang sangat urgen. Workshop ini bukan hanya sekadar bentuk dukungan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari peran perguruan tinggi dan tanggung jawab moral tri dharma perguruan tinggi. Melalui workshop ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang relevan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak serta keterampilan dalam pengelolaan kesekretariatan yang efektif, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam memastikan integritas dan

transparansi dalam proses pemilihan.

Selain itu, workshop ini juga menjadi sebuah platform penting untuk memperkuat kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, workshop ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan Pilkada di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan proses demokratis yang lebih baik dan akuntabel

METODE

sasaran dari kegiatan ini adalah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini sasarannya adalah meningkatnya pemahaman Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi di bidang Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh guna optimalisasi penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan peran asistensi kesekretariatan. Dalam hal ini dapat dirumuskan tahap-tahap kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses pertama dalam pengabdian kepada masyarakat di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi diawali dengan melakukan survei permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Dalam survei ini, ditemukan fakta yang menunjukkan kurangnya jumlah SDM staf baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum pemilu. Kurangnya jumlah staf yang mampu memahami dengan baik aspek hukum pemilu menjadi kendala utama bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, mengingat pentingnya pemahaman hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu serta pengelolaan kesekretariatan secara efektif.
2. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang muncul, tim PPM Universitas Jambi menyusun proposal yang memuat metode pemecahan masalah yang tepat. Disepakati bahwa pendekatan yang paling efektif adalah dengan mengadakan workshop peningkatan pemahaman hukum khususnya dalam hal penanganan pelanggaran pemilu dan pengelolaan kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi yang ditujukan bagi seluruh staf sekretariat. Workshop ini dianggap sebagai strategi yang tepat untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para staf sekretariat Bawaslu tentang aspek hukum yang relevan dan keterampilan praktis dalam menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari. Dengan demikian, workshop ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi kurangnya pemahaman hukum yang menjadi kendala utama bagi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu serta pengelolaan kesekretariatan dengan lebih efektif
3. Pelaksanaan Pengabdian

No	Kegiatan	Tujuan
1	Penyampaian materi dan penjelasan mengenai Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh. Dalam kegiatan ini Ketua Tim Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H akan mewakili tim dalam hal penyampaian materi	Peserta pengabdian memahami aspek yuridis dan konseptual sehubungan dengan Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh
2	Workshop dalam bentuk praktek	Peserta workshop dapat memahami

	nyata terhadap proses penanganan pelanggaran dan bagaimana staf sekretariat berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini akan difasilitasi tim pengabdian lainnya dan mahasiswa yang dilibatkan dalam program PPM.	secara teknis langsung melalui simulasi-simulasi yang dilakukan sehingga tergambar pemahaman hukum dalam aspek apa yang paling penting untuk dipahami dan sisi penting tupoksi staf sekretariat dalam penanganan pelanggaran.
--	---	---

Mitra akan berpartisipasi dalam turut serta melakukan evaluasi dan senantiasa melakukan kegiatan pembinaan serupa secara berkelanjutan sampai pada pelaksanaan Pilkada 2024 dengan melibatkan Tim PPM sebagai pendamping dan fasilitator. Dalam proses evaluasi, mitra akan berkolaborasi dengan Tim PPM untuk mengevaluasi efektivitas dari workshop yang telah dilakukan, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan merumuskan strategi pembinaan lanjutan. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan dan peningkatan pemahaman terus berlangsung hingga Pilkada 2024. Selain itu, mitra juga akan melibatkan Tim PPM dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan serupa di masa mendatang, baik dalam bentuk workshop maupun program lainnya, guna memastikan bahwa peningkatan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berjalan secara berkelanjutan dan terukur hingga pelaksanaan Pilkada 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 3 Oktober 2024, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Hukum dan Pengelolaan Kesekretariatan Dalam Asistensi Penanganan Pelanggaran untuk Staf dan Pendukung pada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh Elfi Prasatya selaku Pimpinan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, Febriardi sebagai Koordinator Sekretariat, serta staf penanganan pelanggaran yang merupakan bagian penting dalam struktur organisasi Bawaslu. Pembukaan acara dilakukan oleh Elfi Prasatya, yang memberikan sambutan hangat sekaligus menekankan pentingnya persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.



Gambar 1. Sambutan dan Pembukaan Acara Oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi

Setelah sambutan, materi workshop disampaikan oleh Dony Yusra Pebrianto dari tim pengabdian, yang mengedepankan dua fokus utama, yaitu integritas penyelenggara pemilu dan pentingnya administrasi pemilu yang tertib. Dony menjelaskan bahwa pemahaman yang kuat mengenai hukum dan pengelolaan kesekretariatan akan sangat membantu staf Bawaslu dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif, terutama dalam penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Materi yang disampaikan bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di lapangan.

Kegiatan ini juga mencakup sesi diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan para peserta untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman terkait dengan tantangan dalam tugas mereka. Aktivitas ini sangat interaktif dan menunjukkan antusiasme peserta dalam menggali lebih dalam mengenai isu-isu yang dihadapi. Dony menekankan bahwa integritas penyelenggara pemilu sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama yang baik antara seluruh anggota tim Bawaslu. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan prosedur administrasi pemilu, diharapkan staf Bawaslu akan lebih siap dalam menjalankan tanggung jawab mereka.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Ketua Tim Pengabdian

Selain itu, workshop ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan jaringan dan kolaborasi antaranggota Bawaslu, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang solid. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk pelaksanaan Pilkada 2024, tetapi juga untuk pengembangan profesional para staf dalam jangka panjang. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Secara keseluruhan, workshop ini berhasil mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan komitmennya untuk terus berupaya dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Harapan kedepan adalah agar seluruh staf dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang didapat dalam kegiatan ini, sehingga mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas mereka di lapangan. Keberhasilan kegiatan ini menjadi indikator bahwa pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

KESIMPULAN

Kegiatan Workshop Hukum dan Pengelolaan Kesekretariatan pada 3 Oktober 2024 memberikan dampak signifikan bagi staf Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Melalui penguatan pemahaman tentang hukum dan administrasi pemilu, peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan lebih efektif, khususnya dalam penanganan pelanggaran. Diskusi interaktif yang berlangsung selama kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam berbagi pengalaman,

menciptakan iklim kerja yang kolaboratif. Untuk peneliti selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak jangka panjang dari pelatihan serupa terhadap kinerja Bawaslu di daerah lain. Rekomendasi untuk Bawaslu adalah untuk terus menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan guna menjaga integritas dan profesionalisme. Selain itu, dukungan dan kerjasama antaranggota harus diperkuat agar tugas pengawasan pemilu dapat dilaksanakan secara optimal. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.

DAFTAR REFERENSI

- Feka, M., Rabawati, D. W., Arman, Y., & Taemenas, E. (2020). Peran DKPP dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Mewujudkan Pilkada Bermartabat. *JAP UNWIRA*, 3(2), 115–129.
- Pamungkas, A. M., & Sy, S. (2023). *Menuju Pemilu 2024*. Deepublish.
- Winardi, W. (2021). Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi. *LECTURER REPOSITORY*.